

Sinergitas Lembaga Mitigasi dalam Menghadapi Bencana di Desa Wonokerto

Hardjono, Sri Suminar, dan Nuraini Dwi Astuti
Prodi Pembangunan Masyarakat dan Desa, STPMD “APMD” Yogyakarta
Email: hardjonopak@yahoo.com.id

ABSTRAK

Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Turi letaknya berbatasan langsung dengan Gunung Merapi, sehingga desa tersebut termasuk salah satu desa rawan bencana. Guna menghindari banyaknya korban jika terjadi bencana maka perlu kesiapsiagaan bagi masyarakat jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, di Desa Wonokerto dibentuk beberapa lembaga mitigasi yang siap membantu menanggulangi bencana yang terjadi. Semua lembaga mitigasi tersebut bekerja bersama, bersinergi saling bahu membahu dari saat sebelum, saat terjadi, maupun pasca terjadinya bencana. Metode penelitian deskriptif kualitatif, penentuan informan menggunakan *snow ball system*, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian bahwa lembaga mitigasi melakukan aktivitas kebencanaan sejak pra bencana baik dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai relawan yang profesional maupun dalam menyiapkan peralatan serta logistiknya. Pada saat terjadinya bencana semua lembaga mitigasi bekerja sama menangani korban bencana di bawah koordinasi BPBD, melakukan evakuasi korban ke tempat pengungsian, membagi logistik yang dibutuhkan pengungsi, membuka dapur umum dan menyiapkan shelter atau hunian sementara. Pada pasca bencana memberikan bantuan psikologi bagi korban bencana dan pendataan korban bencana, kemudian dilaporkan ke BPBD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kata kunci: *Sinergi, Mitigasi, Bencana*

ABSTRACT

Wonokerto village is one of the villages in the Turi sub-district which is on the slope of Mount Merapi, so that the village is one of the disaster-prone villages. In order to avoid many victims in the event of a disaster, it is need community preparedness for the disaster that occurs at any time. Therefore, in Wonokerto Village, several mitigation teams were formed that were ready to help cope with disasters. All of these mitigation teams work together, synergizing hand in hand from before, during, and after the disaster. This research uses qualitative descriptive methods, the informant determination using a snowball system, data collection through observation, interviews, and documentation. While the analysis by describing the data in qualitative form. The results of the study show that mitigation teams have carried out disaster activities since pre-disaster both in increasing their capacity as professional volunteers and in preparing equipment and logistics. When a disaster occurs, all mitigation teams work together to handle disaster victims under the coordination of BPBD, evacuate victims to refugee camps, distribute the logistics needed for refugees, open public kitchens and provide the shelter or temporary shelter. In the post-disaster period, it provides

psychological assistance and data collection for disaster victims, and then it is reported to BPBD for further treatment.

Keywords: *synergy, mitigation, disaster*

PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang sangat sering didera bencana alam, seperti gempa vulkanik Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan bencana alam lainnya. Akibat terjadinya bencana alam tersebut telah menyisakan banyak penderitaan bagi masyarakat di daerah yang terkena bencana bahkan masyarakat lainnya. Di sisi lain, dalam situasi bencana, kelompok rentan menjadi kelompok yang terdampak lebih besar dan berat karena kekurangan dan kelemahannya seperti bayi balita, dan anak-anak, ibu yang sedang hamil, menyusui, penyandang cacat (disabilitas) dan orang lanjut usia (Anonim, 2014: 1). Sering terjadinya bencana alam maka diperlukan kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Desa Wonokerto merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Turi letaknya berbatasan langsung dengan Gunung Merapi sehingga desa tersebut termasuk salah

satu desa rawan bencana. Pengalaman masa lalu ketika erupsi Gunung Merapi tahun 2010 mengeluarkan awan panas dan banjir lahar sehingga menelan korban jiwa, serta rusaknya lingkungan. Dahsyatnya letusan Merapi saat itu memaksa warga masyarakat sampai radius 10 km dari puncak Merapi harus diungsikan. Termasuk semua warga Desa Wonokerto harus meninggalkan rumahnya pergi mengungsi di daerah yang aman. Sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi, tanah longsor, puting beliung, maupun bencana lainnya, maka di Wonokerto dibentuk lembaga mitigasi seperti Unit Tim SAR, Kampung Siaga Bencana (KSB), Desa Tangguh Bencana (Destana), bahkan muncul beberapa lembaga mitigasi internal seperti Pasag Merapi, dan Ragillosan. Semua lembaga mitigasi tersebut saat terjadi bencana saling bekerja bersama secara sinergis untuk membantu para korban bencana di bawah koordinasi BPBD.

Penanganan bencana alam umumnya mencakup kegiatan yang berskala besar dan mencakup wilayah yang luas, sudah barang tentu perlu melibatkan banyak pihak agar beban dan tanggung jawabnya semakin ringan. Pembagian tugas dengan melibatkan banyak orang berlaku dalam sebuah organisasi. Menurut Sondang P. Siagian (1989:7), mengartikan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Terjadinya bencana sangat sulit untuk diprediksikan, kapan, di mana, dan apa bentuknya, tetapi bencana sangat mungkin terjadi di setiap saat, dan terjadi di mana saja. Agar bencana itu tidak menimbulkan banyak kerugian, atau bahkan menimbulkan korban jiwa, maka diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko. Apabila bencana telah terjadi, harus ada tindakan penanganan untuk menyelamatkan korban dengan cara melakukan evakuasi. Hampden -Turner

(1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogis antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasi berbagai macam pengetahuan. Pengertian kualitas sinergi sebagai kualitas hasil kerja sama yang kritical adalah senada dengan kualitas kerja sama dalam proses kolaboratif seperti yang diutarakan oleh Gray (1996) dan seperti diutarakan oleh Bennis dan Biederman (1997) sebagai kreatif *collaboration*, yang menggambarkan kerja sama yang dapat menghasilkan lebih dari apa yang diperkirakan oleh siapa pun. Sesungguhnya teori sinergi (*synergy*) mengacu pada gaya manajemen sinergis dalam organisasi yaitu senantiasa menciptakan harmonis (Salusu, 2004).

Dalam membangun sinergitas, diperlukan koordinasi karena sinergi dan koordinasi, merupakan bagian-bagian atau kegiatan-kegiatan yang secara kooperatif berinteraksi, bermakna integrasi, sedangkan produktif bermakna efektif dan efisien. Dengan demikian sinergi memberi

makna atau arti relatif dianggap sama dengan koordinasi (Stoner dan Walkel, 1992). Hal ini dapat dilukiskan dengan gambar sebagai berikut.

Jadi, tidak salah apabila koordinasi = sinergi. Namun demikian, pengertian koordinasi jauh mempunyai makna yang luas. Dalam hal koordinasi maka seluruh proses kegiatan penetapan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber-sumbernya yang tersedia secara efisien, bersama-sama dan melalui orang-orang yang terkoordinasi dengan penerapan PEOPLE (*planning, executing, organizing, persuading, leading, evaluating*).

Terkait dengan penanggulangan bencana, koordinasi sangat penting, karena tanpanya sangat mungkin akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi, *over lapping* usaha penanganan, ketidakjelasan instruksi dan lain sebagainya. Proses penanggulangan bencana meliputi 3 fase: *pertama*, fase sebelum terjadinya bencana, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana. *Kedua*, saat terjadi bencana,

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. *Ketiga*, pasca bencana, meliputi 2 tindakan utama: 1). Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 2) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Lembaga mitigasi selalu melakukan koordinasi pada setiap fase tersebut baik dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana, langkah-langkah evakuasi, saat terjadinya bencana maupun

penanganan pasca bencana. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui sinergitas lembaga mitigasi dalam menangani kebencanaan di Desa Wonokerto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Moleong (2002: 6) data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterpretasi objektif tentang fenomena-fenomena yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti. Unit analisis adalah pengurus lembaga mitigasi yang ada di Desa Wonokerto terdiri dari 17 orang mewakili lembaga mitigasi Unit SAR, Tagana, KSB, Destana, Ragillosan, Pasag Merapi dan BPBD kabupaten Sleman. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wonokerto merupakan wilayah dari Kecamatan Turi yang letaknya

langsung berbatasan dengan Gunung Merapi berjarak 4 km dari puncaknya sehingga termasuk kawasan rawan bencana. Merapi salah satu gunung teraktif di Indonesia yang sering erupsi, seperti pada Tahun 2010 erupsi Merapi cukup besar. Wilayah yang terdampak erupsi termasuk seluruh desa di Kecamatan Turi, tak terkecuali Desa Wonokerto. Pada saat itu, semua warga Desa Wonokerto harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi.

Luas wilayah Desa Wonokerto 1.103,70 ha, terdiri 13 pedukuhan, 29 Rukun Warga dan 61 Rukun Tetangga. Wilayah Desa Wonokerto digunakan untuk berbagai aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, data yang ada menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbanyak untuk usaha pertanian, yaitu sebesar 550,70 ha (49,89%), luas lahan kering sebesar 425,10ha (38,51%), untuk fasilitas umum 82,99ha (7,52%) digunakan untuk sarana pendidikan/sekolahan, pasar desa, makam, jalan desa dan berupa hutan 45,00 ha (4,08%). Jumlah penduduk 8.802 jiwa, laki-laki 4.463 jiwa atau 50,70% dan perempuan 4.339 jiwa atau 49,30%, secara keseluruhan penduduk laki-laki

lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan selisih relatif kecil yaitu 1,40%. Beberapa kegiatan lembaga mitigasi Wonokerto antara lain:

Kampung Siaga Bencana (KSB)

Desa Wonokerto telah terbentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berdiri pada tahun 2014 dan dibentuk oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang anggotanya berasal dari perwakilan Pemerintah Desa, BPD, PKK, dan Tokoh masyarakat. Pembentukan KSB ini dimaksudkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penanggulangan bencana. Menurut Sunarjo:

“KSB Wonokerto sudah memiliki lumbung sosial, yaitu tempat penyimpanan *buffer stock logistic* yang disiapkan untuk digunakan pada kondisi darurat/ketika terjadi bencana di Wonokerto dan sekitarnya.”

Pengelolaan lumbung dibentuk tim Logistik terlebih dahulu, kemudian tim ini yang bertanggung jawab mengenai barang yang ada di lumbung dengan melakukan opnam fisik secara berkala meliputi pengecekan jumlah barang, kondisi barang, dan tanggal *expired*, penataan barang, pembersihan lingkungan gudang untuk pengisian

barang KSB membuat laporan triwulan mengenai saldo barang yang ada di lumbung KSB. Laporan tersebut dijadikan acuan untuk mengajukan permohonan barang ke Dinas Sosial (Dinsos). Caranya KSB membuat permohonan pengajuan logistik ke Dinsos Kabupaten dengan tembusan ke Dinsos DIY permohonan ini dilampiri foto dan daftar nama yang telah diberikan bantuan logistik.

Untuk pengecekan barang dilakukan secara berkala minimal 1(satu) bulan sekali, untuk pemanfaatan barang di distribusikan ke korban bencana yang terjadi di desa Wonokerto dan sekitarnya, tetapi jika barang mendekati kedaluwarsa dan tidak ada bencana yang terjadi, maka barang bisa disumbangkan untuk kegiatan sosial. Barang yang sudah mendekati kedaluwarsa harus segera dikeluarkan/didistribusikan jika tidak terjadi bencana boleh diberikan untuk kegiatan gotong royong/kegiatan sosial.

Namun, jika sudah terlanjur kedaluwarsa maka barang harus di musnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan barang yang ditandatangani oleh ketua KSB dan kepala Desa Wonokerto. Bahan makan

KSB Wonokerto pernah digunakan untuk kegiatan gotong royong desa pada saat ada event pengajian Cak Ainun Najib pada tahun 2015. Selain itu, KSB pernah menyumbangkan bahan pangan inventaris KSB untuk kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Desa Wonokerto pada tahun 2017 berupa sarden 1200 kaleng, minyak curah @ 2 liter sebanyak 60 bungkus dan kecap 2 kardus.

Selanjutnya Sunarjo menjelaskan bahwa barang yang ada di dalam lumbung sosial merupakan inventaris KSB:

“Barang inventaris yang ada di KSB saat ini dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu barang berupa non pangan dan berupa pangan. Barang non pangan antara lain berupa buku administrasi KSB meliputi dokumen KSB buku daftar hadir anggota, buku notulen, buku daftar tamu, kartu barang, tenda pleton/ tenda pengungsi tenda keluarga tenda gulung, peralatan dapur umum lengkap. Selain itu barang yang diperbantukan adalah matras, selimut, family kids, kids ware, sarung, field bed, ceret, wajan, rantang susun. Sedangkan yang berupa pangan seperti mie, minyak, sarden, sosis dan lainnya, saat ini sudah habis dan belum melakukan pengajuan.”

Peran KSB sebelum bencana adalah melakukan peningkatan kapasitas anggota KSB melalui pelatihan, kemudian mengelola lumbung KSB dengan baik. Ketika terjadi bencana maka KSB bergerak sesuai dengan tupoksi anggota KSB misal: tim Dapur Umum segera menyiapkan bantuan pangan untuk pengungsi, tim *shelter* segera menyiapkan tempat untuk pengungsian, tim logistik menyiapkan barang-barang yang untuk diperbantukan. Secara umum tugas pokok KSB meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melakukan kegiatan penanganan pertama yang mungkin menimpa masyarakat Wonokerto karena KSB sebagai Front linier penanggulangan bencana di tingkat Desa.

Berikut penuturan Eko Praptiwi selaku Tokoh masyarakat:

“Saya pernah diundang KSB untuk mengikuti pelatihan Dapur Umum dan Logistik mewakili PKK Desa. Saya selalu aktif apabila ada pengungsi yang diungsikan di Desa Wonokerto baik yang tahun 2006 maupun yang 2010, saya selalu membantu di Dapur Umum, mendistribusikan bantuan kepada korban bencana dan melakukan

dukungan psikososial kepada para pengungsi terutama untuk kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia dan difabel.”

Dari keterangan ibu Eko Praptiwi dapat dipahami bahwa KSB di Desa Wonokerto pernah melakukan pelatihan untuk menjaga kemungkinan yang terjadi jika bencana menimpa masyarakat Desa Wonokerto, masyarakatnya sudah disiagakan sejak awal sehingga jika terjadi bencana masyarakat telah siap menangani korbannya. Termasuk penanganan terhadap pengungsi dan kelompok rentan.

Selanjutnya, Sunarjo menyampaikan bahwa dalam penanganan bencana selalu bekerja sama dengan lembaga mitigasi yang lain:

“Kerja sama KSB dengan lembaga Mitigasi selama ini walaupun saat terjadi bencana skala kecil misal: angin putting beliung maka KSB ikut bergabung dalam penanganan bencana tersebut. Dulu ketika ada pelatihan mitigasi bencana di Desa Wonokerto KSB menyumbangkan bantuan pangan seperti mie, sarden, sosis, kecap saos, minyak, dan alat dapur umum KSB untuk praktik peningkatan kapasitas bencana di bidang dapur umum. Pesertanya berasal dari anggota Tim SAR, TAGANA, KSB dan PKK Desa.”

Jika terjadi bencana, masyarakat telah dilatih mitigasi berarti masyarakat pernah melakukan simulasi sehingga lebih siap dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi setiap saat. Hal ini tentu sangat membantu bagi masyarakat agar tidak panik, ataupun gegabah dalam mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Menurut keterangan Sunarjo kegiatan KSB Wonokerto selama ini antara lain:

- 1) Membantu penanganan pohon tumbang di wilayah Wonokerto, membantu penanganan bencana kebakaran di wilayah Wonokerto dan Girikerto,
- 2) Menyalurkan bantuan untuk bencana di wilayah Wonokerto dan sekitarnya.
- 3) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas relawan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten, Dinsos DIY, dan TAGANA Desa Wonokerto.
- 4) Mengikuti lomba jambore antar KSB se-DIY.
- 5) Berpartisipasi dalam lomba Desa Wonokerto.
- 6) Membuat road map bencana yang ada di Desa Wonokerto meliputi: peta wilayah bencana, histori

bencana, potensi yang ada, peta kerentanan bencana.

KSB selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial setiap 6 bulan sekali dan ada pertemuan pengurus KSB se-DIY dengan Dinas Sosial. Pada pertemuan itu, selalu ada pengarahan dari Dinas Sosial kepada KSB dan ada evaluasi kegiatan KSB karena setiap kegiatan KSB harus dilaporkan ke Dinsos, atau di-*upload* di group WA forum KSB se-DIY sehingga menjadi motivasi bagi tim KSB yang lainnya. Menurut Sunarjo kegiatan yang dilakukan dalam gardu sosial antara lain:

“KSB Desa Wonokerto selain memiliki lumbung, juga sudah memiliki Gardu Sosial sebagai sekretariat tempat untuk tukar informasi dan pendapat antar anggota KSB dan dapat berfungsi sebagai Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalop) pada saat terjadi bencana. Selain itu juga digunakan untuk melakukan penyuluhan tentang bencana, pengelolaan logistik, pendistribusian barang logistik kepada korban bencana, melakukan pelaporan kondisi barang kepada Dinas Sosial.”

Pertanggungjawaban KSB dalam menjaga keberlangsungan barang yang menjadi tanggungannya, melakukan cek fisik secara berkala meliputi kondisi

barang, jenis barang, jumlah barang, dan *expired* barang kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial setiap 3 bulan sekali. Dalam waktu dekat KSB akan membuat rak atau pallet untuk meletakkan barang bantuan agar tidak mudah rusak. Dana untuk membuat rak ini dianggarkan dari Dana Desa melalui RPJMDes.

Desa Tangguh Bencana (Destana)

Destana Desa Wonokerto dibentuk pada bulan Juli 2016 oleh BPBD Sleman, yang beranggotakan perwakilan dari perangkat Desa, anggota BPD, Karang Taruna, dan PKK Desa. Tujuan dibentuk Destana agar masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari bencana dan sekaligus sebagai pelaku langsung yang akan merespons bencana di sekitarnya dengan dukungan dari berbagai pihak dapat ditingkatkan ketangguhannya terhadap upaya untuk mengurangi risiko dari bencana sehingga dapat mengurangi angka korban atau bahkan sampai ke nihil korban.

Jadi, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek dalam penanggulangan bencana. Setiap terjadi kejadian bencana di Wonokerto Destana

membuat laporan kejadian di BPBD Sleman, kemudian dilakukan koordinasi dengan para pengurus Destana untuk diadakan pengarahan dari BPBD. Harjo sebagai ketua Destana Desa Wonokerto memberikan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan Destana ketika terjadi bencana anggota Destana terjun ke lokasi bencana dan langsung menangani dampak dari bencana misal: mengondisikan pohon tumbang yang mengganggu jalan, memperbaiki rumah warga yang rusak terkena angin rebut, melakukan evakuasi jika ada korban. Kegiatan yang dilakukan oleh Destana dalam penanggulangan bencana lebih terfokus pada PRA BENCANA karena Destana lebih pada program penyusunan SOP, membuat dokumen rencana kontingensi dan membuat kajian risiko. Selain itu kegiatan Destana membuat rencana program, pemetaan wilayah juga ikut bergabung ke Destana se-Kabupaten Sleman dengan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan relawan Destana.”

Berangkat dari keterangan ketua Destana Desa Wonokerto tersebut dapat diketahui bahwa anggota Destana juga terlibat dalam proses evakuasi saat terjadinya bencana, walaupun

sebenarnya pembentukan Desa tahan bencana itu kegiatannya lebih terkonsentrasi pada pra bencana. Kerja sama dengan organisasi mitigasi lain melakukan penanganan bencana yang ada di wilayah Wonokerto, biasanya anggota langsung bergabung dengan anggota relawan yang lain. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan Destana adalah laporan tertulis kepada BPBD.

Radio Panggil Ngelodadi dan Ngembesan (RAGILLOSAN)

Pada tahun 2006 terjadi keresahan di masyarakat Ngelodadi dan Ngembesan, yaitu maraknya pencurian yang sering terjadi di kedua pedukuhan tersebut, mengakibatkan kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat akan keselamatan harta benda yang dimilikinya. Ketua karang taruna berinisiatif untuk membentuk forum radio komunitas antar RT dengan alat komunikasi HT sehingga jika terjadi pencurian segera dapat diinformasikan ke anggota masyarakat yang lain. Organisasi baru ini kemudian diberi nama Ragil Losan (Radio Panggil Ngelodadi Ngembesan). Menurut Ketua Ragillosan Tri Hartono:

“Keanggotaan awalnya hanya masyarakat Ngelodadi dan Ngembesan tetapi sekarang berkembang bahkan banyak yang berasal dari luar Desa Wonokerto seperti dari Mlati dan Sleman.”

Dari keterangan tersebut organisasi Ragillosan semakin berkembang sehingga bukan saja untuk kepentingan internal Desa Wonokerto, melainkan juga untuk wilayah yang lain. Bahkan keanggotaannya sudah meluas sampai di luar kecamatan Turi. Selanjutnya Tri Hartono menyampaikan bahwa:

“Seiring berjalannya waktu dan dilatarbelakangi kondisi geografis Pedukuhan Ngelodadi dan Ngembesan yang masuk daerah rawan bencana erupsi Merapi maka organisasi ini berkembang tidak hanya untuk keamanan pedukuhan, tetapi juga untuk menyebarluaskan informasi mengenai keaktifan Gunung Merapi dan bencana lain.”

Ragillosan yang semula hanya berkiprah di bidang keamanan, namun dalam perkembangannya meluas ke bidang penanganan kebencanaan, terutama untuk menyebarluaskan kondisi aktivitas Gunung Merapi. Lebih lanjut, Tri Hartono mengemukakan:

“Pada tahun 2010, organisasi Ragil Losan berpartisipasi dalam penyebaran informasi

mengenai siaga, darurat dan pasca bencana erupsi Merapi, hingga kini organisasi Ragil Losan aktif dalam penanganan kebencanaan baik di Desa Wonokerto maupun di luar Wonokerto. Bahkan organisasi Ragil Losan telah terdaftar di Forum Komunitas-Komunitas Relawan Sleman yang diwadahi oleh BPBD Sleman.”

Saat ini Ragillosan telah diakui oleh BPBD Kabupaten Sleman, bahwa organisasi ini merupakan salah satu lembaga yang punya peran dalam menginformasikan kabar tentang kebencanaan. Tri Hartono selanjutnya menegaskan bahwa:

“Bidang utama tugas Ragil Losan dalam menangani bencana adalah sebagai penyampai informasi melalui HT tetapi tidak menutup kemungkinan ikut terjun langsung dalam penanganan bencana misal: mengondisikan pohon tumbang, memperbaiki rumah yang diterpa angin kencang, ikut membantu/Gotong royong memperbaiki rumah yang kebakaran.”

Untuk meningkatkan kapasitas anggota Ragillosan anggota dilibatkan dalam berbagai pelatihan yang terkait dengan penanganan kebencanaan. Kata bapak Tri Hartono yang dilakukan adalah.

“Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas relawan yang dilakukan oleh BPBD meliputi pelatihan Rescue untuk penolongan laka air, pelatihan komunikasi untuk meningkatkan keahlian dalam berkomunikasi, pelatihan SAR, pelatihan pertukangan pelatihan ini untuk keahlian pertukangan yang biasanya dilakukan pada tahap pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan.”

Merujuk pada keterangan tersebut menunjukkan bahwa bidang kegiatan Ragil Losan semakin meluas bukan saja terbatas pada bidang komunikasi, melainkan juga membekali anggotanya untuk berperan aktif pada penanganan korban bencana sampai dengan pasca bencana. Selama ini Ragil Losan selalu bergabung dengan organisasi lain baik yang ada di Wonokerto ataupun di luar Wonokerto dalam penanganan bencana tidak hanya bidang komunikasi tetapi untuk bidang yang lain juga seperti SAR, dan pengungsian.

Unit SAR Wonokerto

Unit SAR Wonokerto dalam upaya mengurangi risiko bencana (mitigasi) di antaranya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara perorangan maupun berbasis kelompok masyarakat ataupun kepemudaan (Karang Taruna). Dalam

sosialisasi ini juga memberikan pemahaman tentang ancaman bencana, kesiapsiagaan dan upaya penanggulangan bencana yang sebenarnya tugas pokok dan fungsinya SAR adalah sebagai tim respons atau bersifat tim darurat. Ketika pra bencana (status normal) tim SAR selalu berlatih dan melatih diri mereka terhadap kesiapsiagaan ancaman bencana. SAR DIY Unit WONOKERTO bukan lembaga Desa Wonokerto, tetapi sebagai lembaga swadaya dan sebagai unit kecil dari Induk SAR DIY, yang *notabene* adalah swadaya baik inventaris maupun dana kegiatan ataupun mandiri tanpa APBD ataupun APBN.

Dalam hal mitigasi karena lingkup SAR DIY Unit Wonokerto terutama mengampu pada KRB Gunung Merapi, selain memberikan pemahaman mengenai penanggulangan bencana juga telah memberikan tas disaster kepada warga di wilayah KRB 2 dan 3 yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan surat-surat berharga dan perhiasan yang ketika terjadi bencana erupsi Merapi. Tim SAR melakukan evakuasi menemukan tas tersebut di area bencana tersebut berarti itu adalah tas yang berisi aset berharga. Tas

Disaster juga berfungsi ketika terjadi bencana erupsi Merapi warga tinggal membawa tas tersebut sehingga tim evakuasi mudah menandai dan mengamankan tas tersebut. SAR DIY Unit Wonokerto juga rutin mengasah ilmu tentang SAR maupun bencana, sebagai tim mitigasi dan sebagai bentuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Tommon sebelum menjadi kepala Desa Wonokerto sebagai Komandan SAR DIY Unit Wonokerto, yang aktif di kegiatan penanggulangan bencana seperti erupsi Merapi, penanganan bencana dalam skala kecil yang ada di Desa Wonokerto dan di luar Wonokerto. Beliau merasa beruntung bisa terjun langsung menangani bencana erupsi Merapi baik yang 2006 maupun yang 2010. Saat itu ia ikut mengevakuasi warga yang berada di Tunggul Arum untuk diungsikan ke Balai Desa. Menurut Tomon tentang kerja sama lembaga mitigasi sebagai berikut:

“Untuk lembaga yang paling berperan dalam pemberian pertolongan korban bencana, erupsi Merapi semua lembaga mitigasi bekerja sama bahu membahu memberikan pertolongan kepada korban

bencana. Semua relawan yang ada di lokasi melakukan penanganan bencana sesuai dengan kapasitas masing-masing relawan.”

Dari pernyataan Tomon tersebut memberikan pemahaman bahwa saat terjadi bencana semua lembaga mitigasi saling bekerja bersama-sama, saling mengisi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Selanjutnya. Tomon juga mengatakan bahwa terjadi permasalahan di lapangan selalu dikoordinasikan sesuai bidang-bidangnya.

“Jika terjadi gangguan di masyarakat maka desa segera berkoordinasi dengan instansi terkait missal: untuk kesehatan desa berkoordinasi dengan puskesmas, untuk masalah keamanan Desa berkoordinasi dengan Polsek, untuk masalah lahan pertanian Desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.”

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kebencanaan Desa selalu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. Saat ditanya tentang peran pemerintah desa dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana:

“Masyarakat di lereng Merapi secara turun menurun sudah mengetahui aktivitas Merapi

sehingga masyarakat sudah siap secara mental menghadapi bencana erupsi. Selain itu, dari Desa Wonokerto melakukan pemantauan melalui dukuh apabila terjadi gangguan di masyarakat pasca erupsi Merapi.”

Tagana Wonokerto

Cara merekrut anggota melalui organisasi Karang Taruna atau lewat pemerintah Desa. Karang Taruna adalah mitra dari Dinas Sosial sehingga informasi melalui organisasi Karang Taruna akan lebih cepat sampai ke masyarakat. Cara lain yang pernah dilakukan di Desa Wonokerto adalah Dinas Sosial mengirim surat agar desa mengirimkan relawannya untuk dilatih menjadi anggota Tagana. Rahmadi mengatakan bahwa.

“Program dari Dinas Sosial di tiap Desa ada anggota Tagana, hal ini untuk mempercepat penanganan bencana, misal di suatu desa terjadi bencana maka anggota Tagana yang paling dekat dengan bencana akan segera melakukan assessment/rapid assessment yang tujuannya untuk menentukan kebutuhan dan penanganan yang tepat untuk meminimalisir korban dan dampak bencana. Kemudian hasil assessment dilaporkan ke posko tagana kabupaten dan dilanjutkan ke posko Tagana Induk dan tidak menutup

kemungkinan dilaporkan ke Kementerian Sosial.”

Anggota Tagana Desa Wonokerto berasal dari Pedukuhan Kopen, Pulesari, Tunggularum dan Garongan. Pada saat bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010, Tagana melakukan evakuasi untuk diungsikan ke Desa Wonokerto, menyiapkan shelter untuk pengungsi, membuka dapur umum, dan melakukan layanan dukungan psiko sosial untuk korban bencana.

Perbedaan Tagana terverifikasi dengan Tagana yang tidak adalah Tagana yang aktif di kegiatan seperti piket posko, melakukan pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas baik yang difasilitasi oleh Dinas Sosial ataupun oleh pihak lain, melakukan penanganan bencana langsung dan siap untuk di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi). Kemudian untuk Tagana terverifikasi ini wajib mengumpulkan surat kesanggupan untuk aktif dan dikumpulkan di posko kabupaten untuk diteruskan ke Dinsos Kabupaten. Hal ini dilaporkan ke Kementerian Sosial untuk mengukur seberapa kekuatan personil yang ada di tingkat Kabupaten.

Sementara itu, Tagana yang tidak terverifikasi adalah anggota Tagana

yang belum bisa aktif di kegiatan dan tidak berhak untuk mendapat fasilitas, seperti seragam, tali asih, dan pelatihan baik yang di adakan oleh Dinsos Kabupaten maupun provinsi. Verifikasi diadakan tiap tahun. Jadi, jika ada anggota Tagana yang belum bisa aktif pada tahun ini bisa aktif di tahun berikutnya. Rahmadi menambahkan bahwa.

“Pengelolaan logistik yang ada di Dinas Sosial Logistik sebelum diserahkan ke masyarakat dan masih disimpan di gudang logistik kabupaten dan provinsi adalah masuk ke barang titipan kementerian. Jadi, pengelolaannya harus bisa di pertanggungjawabkan dan transparan. Di gudang logistik dilakukan penataan sesuai jenis barang, dilakukan opname fisik untuk mengetahui jumlah barang, kondisi barang dan expired barang.”

Kemudian untuk pengeluaran barang apabila terjadi bencana, misalnya kebakaran, Dinas Sosial membuat Berita Acara Serah Terima. Barang yang dikeluarkan sesuai hasil *assessment* yang dilakukan oleh anggota Tagana karena dari hasil *assessment* itu bisa diketahui mengenai kebutuhan mendesak yang harus

dipenuhi. Selanjutnya Rahmadi mengatakan:

“Jika pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bantuan datang terlebih dahulu melapor ke posko utama kemudian dicatat disimpan di tenda logistik. Dilakukan penataan, dipilah berdasar jenisnya kemudian bila ada permintaan, barang dicatat di pengeluaran barang.”

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan logistik cukup ketat, semua barang tercatat dan pendistribusiannya pembukuan terdokumentasi dengan tertib. Dengan demikian, tidak ada barang inventaris dari Dinas Sosial yang tidak terdaftar.

Menurut Rahmadi, KSB adalah binaan dari Tagana, jadi dalam pelaksanaan tugas tidak pernah ada masalah. Jika Tagana ada kegiatan mitigasi dan membutuhkan personil tambahan, tidak menutup kemungkinan menambah personil dari Tim KSB. Kemudian jika terjadi bencana di suatu wilayah maka KSB terdekat langsung bergabung dengan Tim Tagana. Berhubung KSB sudah punya Logistik sendiri, maka diharapkan ketika terjadi bencana di tingkat kelurahan KSB sudah bisa mandiri dalam

penanganannya. Jika logistik KSB habis, dari KSB mengajukan permohonan Logistik ke Dinsos khusus untuk makanan.

Menurut Rahmadi bencana yang pernah ditangani seperti erupsi Gunung Merapi tahun 2010, penanganan angin rebut, penanganan pohon tumbang, penanganan kebakaran. Tagana yang di wilayah Tunggul Arum melakukan evakuasi warga, Tagana yang lain membuka Dapur Umum di Pengungsian dan Layanan Dukungan Psikososial pada korban bencana. Rahmadi selanjutnya mengatakan bahwa pembagian tugasnya belum begitu jelas sesuai penugasan masing-masing relawan langsung berbaur saja. Hal ini karena mereka belum memahami penugasan masing-masing, maka penanganan belum terorganisir secara baik meski tidak ada *over lapping*.

Pasag Merapi

PASAG MERAPI singkatan dari Paguyuban Sabuk Gunung Merapi yang merupakan suatu organisasi kemanusiaan berdiri sejak tahun 1994 tepatnya setelah terjadinya erupsi Merapi. Sebuah LSM membuat program pelatihan manajemen bencana atau biasa disebut pelatihan penanggulangan

bencana yang diikuti oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah lereng Gunung Merapi baik dari Yogyakarta, Boyolali, Magelang, maupun Klaten. Materi pelatihan ini berupa materi PPGD, manajemen posko, selter, barak pengungsian, dan dapur umum. Kemudian LSM itu memberikan sebuah gagasan untuk membuat sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan terutama di seputaran lereng Merapi yang sampai saat ini organisasi ini dinamakan PASAG MERAPI. Jumlah anggota di wilayah kabupaten Sleman sekitar 53 orang. Menurut penuturan Kristanto sebagai ketua organisasi PASAG MERAPI wilayah Sleman:

“Tugas utama dari Pasag Merapi adalah menjaga kelestarian alam di wilayah lereng gunung Merapi, konservasi alam, bantuan komunikasi karena mempunyai RPU, bergerak di bidang sosial kemanusiaan.”

Keterangan ketua Pasag Merapi menjelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi ini lebih cenderung kepada kegiatan kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Sehubungan lembaga ini secara territorial mencakup beberapa kabupaten sudah barang tentu wilayah

kerjanya terutama di daerahnya masing-masing, walaupun tidak menutup kemungkinan saling menjalin kerja sama antar daerah. Lebih lanjut Kristanto mengatakan kegiatan yang pernah dilakukan dalam penanggulangan bencana:

“Bersih-bersih rumah pasca erupsi Gunung Kelud tahun 2015, trauma healing pada saat erupsi Gunung Agung di Bali, melakukan upaya percepatan pemulihan pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010, menjadi mitra kerja polisi hutan.”

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Pasag Merapi tidak saja meliputi wilayah Yogyakarta – Jawa Tengah, tetapi sampai di Pulau Bali. Kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya adalah ikut serta menjaga lingkungan hutan bersama polisi hutan untuk melestarikan wilayah pegunungan agar tidak terjadi pengrusakan baik lingkungan maupun penggundulan hutan.

Lembaga-lembaga mitigasi yang terdapat di Desa Wonokerto, selalu bekerja bersama pada saat menanggulangi suatu bencana sehingga penanganan korban cepat dilakukan. Antar lembaga mitigasi bekerja secara sinergis dengan menempatkan diri

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di bawah koordinasi BPBD. Pola kerja sama antar lembaga mitigasi tersebut dapat Digambarkan dalam bentuk bagan 2 sebagai berikut:



SIMPULAN

Desa Wonokerto termasuk daerah rawan bencana sehingga telah dibentuk berbagai lembaga mitigasi baik yang berinduk di tingkat Provinsi (SAR, TAGANA, KSB, Destana), maupun tingkat provinsi, serta yang berinduk di tingkat Desa (RagiLosan dan Pasag Merapi).

Dalam rangka penanggulangan bencana, anggota maupun pengurus organisasi mitigasi telah memperoleh pelatihan cara-cara menangani bencana baik pada waktu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana bagi anggota masyarakat diikutkan dalam latihan dalam bentuk simulasi. Institusi

yang memberi pelatihan BPBD, Dinas Sosial, dan SAR.

Saat terjadinya bencana lembaga-lembaga mitigasi saling bekerja sama secara sinergis di bawah koordinasi BPBD.

Rekrutmen anggota organisasi mitigasi di Desa Wonokerto dengan sistem ditunjuk untuk mewakili Desa, bukan atas kemauan dari individu secara langsung, maka BPBD perlu mengadakan kegiatan secara periodik yang sifatnya menumbuhkan semangat untuk peka bencana/ lingkungan. Harapannya tumbuh kader-kader kemanusiaan yang memiliki jiwa militan

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2014. *Pedoman Advokasi Sosial Tanggap Darurat Korban Bencana Alam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
- Edwards III, Goerge, C. 1992. *Implementing Publik Policy*. Congressional: Quarterly Press.
- Isamail, Solihin. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana*.
- Ketchen Jr. D.et all. 2009. *Strategy 2008–2009*. New York: McGraw-Hill.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Nuh. 2005. *Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Sosial UGM.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang *Taruna Siaga Bencana*.
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2011 tentang *Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman,
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
*Perubahan atas Perda Nomor 9
Tahun 2009 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sleman.*

Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Nomor 1 Tahun 2012 tentang
*Pedoman Umum Desa/
Kelurahan Tangguh Bencana.*

Siagian, P. Sondang. 1989. *Filsafat
Administrasi*. Jakarta: CV Haji
Mas Agung.

Subarsono, A.G. 2006. *Analisis
Kebijakan Publik (Konsep,
Teori dan Aplikasi)*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan
Upaya Mewujudkannya dalam
Perspektif Masyarakat Lokal*.
Yogyakarta: Pustaka Pelaja